

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2022 Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi meluncurkan Kurikulum Merdeka yang sebelumnya telah melalui uji coba pada tahun 2021 di sekolah penggerak yang berada di 111 kabupaten/ kota (Kemdikbud, 2023). Kurikulum ini hadir sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi Covid-19 (CNN Indonesia, 2024). Kurikulum Merdeka dirancang dengan pendekatan yang lebih fleksibel, fokus pengembangan *soft skills* dan karakter siswa, serta fokus pada kompetensi esensial siswa (Direktorat Sekolah Dasar, 2024). Struktur Kurikulum Merdeka bukan saja hanya memuat pembelajaran intrakurikuler yang menekankan pada pendidikan akademik dan proses belajar mengajar di kelas, akan tetapi juga pembelajaran kokurikuler yang menitikberatkan pada pengembangan karakter peserta didik sekaligus sebagai penunjang penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan pembelajaran intrakurikuler di kelas (Kemendikbudristek, 2024). Pendidikan karakter yang ingin dicapai dalam Kurikulum Merdeka ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Indonesia yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pusdiklat Perpunas, 2024).

Peraturan Mendikbudristek Pasal 7 ayat 1 No.12 Tahun 2024 menjelaskan bahwa struktur Kurikulum Merdeka memuat intrakurikuler dan kokurikuler. Dilanjutkan dengan Pasal 16 ayat 2 yang menjelaskan bahwa kokurikuler dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Adapun Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik (Kemendikbudristek, 2024). Profil Pelajar Pancasila dirancang untuk

menggambarkan karakter ideal yang diharapkan dari setiap siswa dalam sistem pendidikan Indonesia. Karakter ideal yang dimaksud, yakni beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karakter yang baik tidak hanya menciptakan individu yang baik secara moral, tetapi juga membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berdampak positif pada masyarakat (Rahayu et al., 2023).

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya, kita juga tidak bisa mengabaikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Perlu adanya pertimbangan yang mendalam dan waktu yang tidak singkat supaya satuan pendidikan yang menjadi target dari pelaksanaan program ini mulai terbiasa dan mampu memunculkan hasil yang diharapkan oleh kebijakan. Kemunculan kebijakan yang tiba-tiba dan kerap mengalami perubahan, serta harus diimplementasikan dalam waktu dekat sering menjadi penyebab berbagai problematika muncul di lapangan. Hal tersebut dikarenakan para satuan pendidikan belum sempat untuk menyelesaikan proses adaptasi dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan baru secara matang.

Realitas implementasi P5 sering kali menunjukkan kontradiksi yang signifikan terhadap tujuan awal program. Meskipun dirancang untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dalam pelaksanaannya kerap terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi guru, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya dukungan dan partisipasi aktif dari siswa maupun orang tua. Selain itu, pengelolaan waktu yang tidak efektif membuat integrasi program menjadi kurang maksimal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara konsep ideal P5 dengan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga program tidak sepenuhnya mencapai tujuannya. P5 sebagai salah satu program Kurikulum Merdeka telah memberikan beban moral bagi warga sekolah untuk beradaptasi dengan kurikulum baru dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran (Yunazar et al., 2024). Guru dibuat resah karena banyaknya tuntutan yang dibebankan kepada mereka. Dengan mengintegrasikan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran P5 menuntut

guru untuk mampu mengoperasikan media belajar berbasis digital (Maudyna et al., 2023). Bukan hanya guru saja, peserta didik juga dibuat bingung dalam menginternalisasi pembelajaran pada kurikulum baru. Perubahan sistematika pendidikan, proses asesmen hingga perubahan administratif menjadi tantangan baru bagi peserta didik (Susmanto et al., 2023). Kebelumsiapan sekolah dalam mengaplikasikan Kurikulum Merdeka menjadi penyebab terbesar ketidakberhasilan proses belajar mengajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan pada kurikulum ini.

SD Negeri Gudo menjadi salah satu sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka dan P5 sebagai bagian dari kurikulum tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal, kedudukan koordinator P5 di SD Negeri Gudo ditempati oleh Kepala Sekolah. Hal tersebut bukan menjadi suatu masalah, karena dalam Panduan Pengembangan P5 sudah dijelaskan bahwa perencanaan dalam pembentukan koordinator dan fasilitator P5 dikembalikan lagi kepada satuan pendidikan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan mereka. Pimpinan satuan pendidikan dapat menentukan seorang koordinator proyek profil, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek (Kemdikbud, 2022). Akar dari berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan P5 di SD Negeri Gudo yaitu kebelumsiapan sekolah dalam mengimplementasikan P5 karena kurangnya dukungan dalam pemenuhan sumber daya. SD Negeri Gudo belum berstatus sebagai sekolah penggerak dan belum memiliki satupun guru penggerak atau calon guru penggerak. Hal tersebut, turut menyumbang tantangan dalam implementasi P5, karena pengalaman dari guru penggerak sangat berkontribusi dalam pengembangan strategi pengimplementasian P5. Selain itu, belum ada satupun guru SD Negeri Gudo yang pernah mengikuti pelatihan P5. Pelaksanaan P5 di SD Negeri Gudo selama ini lebih menekankan pada tercapainya beban kurikulum dari pada kualitas pengajaran dan tujuan dari pembelajaran. Situasi, kondisi, dan segala keterbatasan yang ada di SD Negeri Gudo menjadi tantangan dalam implementasi P5. Sebagai suatu kebijakan baru karena berbagai kondisi di lapangan menyebabkan belum terlaksananya tahapan

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila secara keseluruhan (Asiati & Hasanah, 2022).

Berbagai problematika yang telah dijelaskan di atas, bukanlah menjadi suatu hal yang baru. Keadaan seperti ini sudah umum terjadi sebelumnya. Sejak kurikulum pertama pada awal kemerdekaan Indonesia diterapkan yakni Kurikulum Rencana Pelajaran 1947, sejak saat itu pula kurikulum nasional kerap mengalami perubahan. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dirubah menjadi Kurikulum Rencana Pelajaran 1960. Kemudian pada rentang waktu tahun 1968 hingga 1994, kurikulum Indonesia mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Hingga pada akhirnya kurikulum mengalami perubahan kembali menjadi Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) (Hidayat, 2021). Selama lintasan sejarah perubahan kurikulum tersebut terjadi, tentunya masing-masing kurikulum membawa berbagai problematikanya sendiri dalam tahap implementasinya di lapangan.

Kebingungan dan keresahan akibat kerapnya pergantian kurikulum masih dirasakan ditahun-tahun berikutnya. Seperti misalnya KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang sempat menjadi perbincangan banyak orang. KBK telah menjadi wacana tersendiri yang menyedot perhatian semua orang yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan baik pejabat tingkat pusat, dinas, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, murid, dan orang tua murid. Tidak berhenti disana, konsep-konsep pendidikan lainnya yang juga pernah digaung-gaungkan namun tidak jelas pelaksanaannya yaitu pendidikan humaniora (masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto) dan pendidikan sistem ganda (*link and match*) pada masa Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro (Darmaningtyas, 2005). Kedua konsep pendidikan itu hanya bertahan selama penggagas wacana tersebut menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan kemudian hilang tenggelam bersama dengan lengsernya kekuasaan. Dari konsep-konsep pendidikan yang telah dipaparkan di atas, seluruhnya memunculkan berbagai problematika dan kesulitan dalam implementasinya. Walaupun seluruh gagasan dalam pengembangan kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, pada

kenyataannya seluruh kurikulum tersebut masih mengalami kegagalan dalam tahap implementasinya. Sama halnya dengan Kurikulum Muatan Lokal yang secara filosofis maupun substantif dianggap sebagai suatu gagasan yang sudah sempurna, namun kenyataannya hal tersebut juga mengalami kegagalan pada tingkat implementasinya. Sangat amat disayangkan bahwa perubahan kurikulum dengan berbagai problematikanya yang terjadi selama ini, sejatinya hadir karena menyesuaikan dengan tujuan dari para penguasa yang sedang bertahta.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang berbagai problematika yang muncul dalam implementasi kebijakan baru yakni Kurikulum Merdeka dan P5 dilakukan oleh Medina dan Reno Fernandes. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa setelah dilakukan penerapan P5 masih banyak aksi *bullying* yang dilakukan oleh peserta didik kepada teman sekelas yang lebih lemah darinya, peserta didik masih belum menunjukkan sikap demokratis, dan belum adanya kemampuan bernalar kritis (Medina & Fernandes, 2023). Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian Maulidi, dkk menguraikan tantangan dalam implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam pada Profil Pelajar Pancasila, peserta didik masih belum memiliki ketertarikan dalam menerapkan nilai-nilai agama yang mana hal tersebut dapat diketahui dari beberapa hal yang dilakukan peserta didik dalam hidup mereka (Maulidi et al., 2022). Adapun penelitian Lilis Iswatul Jannah yang menguraikan tentang kendala yang terjadi dalam penerapan P5 yaitu penerapan dimensi belum menyeluruh kesemua elemen dan subelemen, kurangnya pengetahuan siswa terhadap budaya lain, siswa sulit berkerja sama dengan kelompoknya, siswa belum mampu mengerjakan tugas secara mandiri, siswa sulit memahami tugas atau materi yang diberikan, serta kurangnya bahan, alat, dan kreatifitas (Jannah L. I., 2023). Hal yang sama juga diungkapkan Amalia Nugraha Fisabilila, bahwa kendala yang dihadapi guru saat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yaitu kurangnya pengetahuan guru mengenai asesmen non kognitif sehingga belum terlaksana secara terstruktur dengan baik dan ruang kelas yang kurang memadai (Fisabilila, 2023). Penelitian Seni Asiati juga menguraikan segala bentuk tantangan yang dihadapi dalam penerapan P5, dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan menyebabkan belum terlaksananya tahapan

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila secara keseluruhan (Asiati & Hasanah, 2022). Berbagai problematika yang ada dalam adaptasi P5 dipertegas oleh pernyataan Rizky Yunazar dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa P5 sebagai salah satu program Kurikulum Merdeka memberikan beban moral bagi warga sekolah untuk beradaptasi dengan kurikulum baru dalam mencapai tujuan pembelajaran (Yunazar et al., 2024).

Ketidakberjalanan atau ketidakberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam menanamkan pendidikan karakter kepada siswa menunjukkan adanya disfungsi dari elemen atau struktur yang ada di dalamnya. Guna memahami implementasi P5 dalam membentuk karakter siswa di SD Negeri Gudo serta struktur mana saja yang mengalami disfungsi maka diperlukan pisau bedah untuk melihatnya. Teori struktural fungsional Talcott Parsons dan Robert King Merton memungkinkan untuk digunakan dalam meninjau hal tersebut. Teori struktural fungsional memiliki keselarasan dengan penanaman pendidikan karakter mulai dari pengenalan sampai pada internalisasi nilai-nilai (Sulistiawati & Nasution, 2022). Dengan begitu, menggunakan teori ini dapat membantu peneliti untuk menemukan hal-hal apa saja yang mengalami fungsi dan disfungsi sehingga mempengaruhi sistem dalam mencapai tujuannya.

Melihat dari berbagai permasalahan yang ada, menunjukkan bahwa tidak semua dan tidak selalu kebijakan pendidikan nasional dapat dengan mudah dilaksanakan di lapangan. Kebijakan yang kerap berubah turut menyumbang ketidakberhasilan dan ketidakefektifan dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Hasil dari suatu kebijakan pendidikan oleh pemerintah pusat juga tidak bisa digeneralisir mengingat adanya situasi, kondisi, dan keterbatasan yang berbeda di setiap satuan pendidikan. Topik ini memang sudah sepatutnya menjadi pokok bahasan yang krusial supaya dapat dipikirkan kembali terkait alternatif yang bisa digunakan untuk menunjang tercapainya harapan dari kebijakan pendidikan nasional dengan menyesuaikan kondisi di tiap-tiap satuan pendidikan. Selain itu, sudah seharusnya problematika dalam sistem pendidikan mendapat kajian dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek sosial. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Disfungsi Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN Gudo Kabupaten Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: “Bagaimana disfungsi implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SD Negeri Gudo Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui disfungsi implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SD Negeri Gudo Kabupaten Jombang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bacaan yang representatif dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Wahana memperkaya khasanah keilmuan sosial dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang disfungsi implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam satuan lembaga pendidikan serta pengetahuan tentang problematika yang terjadi dalam implementasi P5.
 - c. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi penulis terhadap khazanah ilmu sosial, khususnya dalam penggunaan pemikiran Robert King Merton mengenai teori struktural fungsional, serta menjadi kontribusi penulis dalam subdisiplin keilmuan sosiologi pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai disfungsi implementasi P5 di satuan lembaga pendidikan khususnya di lokasi penelitian, yaitu di SD Negeri Gudo sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan strategi implementasi P5 selanjutnya.